

# KEBIJAKAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI KERAKYATAN

Disampaikan oleh:  
DR. Marwanto Harjowiryono, M.A.

Yogyakarta, 12 Desember 2013

## Pokok Bahasan

- ❑ Ekonomi Kerakyatan di Indonesia
- ❑ Peran Fiskal Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan

2

## Ekonomi Kerakyatan di Indonesia

- ◆ Pemikiran Prof. Mubyarto akan Ekonomi Pancasila\*
  - ◆ Banyaknya pemikiran Neo-Klasik di Indonesia, yaitu kecilnya peranan pemerintah dalam perekonomian
  - ◆ Ekonomi Indonesia dianggap ajaib di tahun 1993, namun “dihancurkan” krisis moneter 1997, menunjukkan kekeliruan fatal teori ekonomi konvensional.
  - ◆ Ilmu ekonomi Pancasila lahir bersamaan dengan keyakinan adanya kekeliruan dalam ilmu ekonomi konvensional.
  - ◆ Ilmu ekonomi Pancasila lahir ditandai dengan pembukaan Kuliah Ekstrakurikuler Ekonomi Pancasila (KEEP) tanggal 26 Maret 2005.

Mubyarto, Lahirnya Ekonomi Pancasila, 2005

3

## Ekonomi Kerakyatan di Indonesia

- ◆ Pemikiran Ekonomi Kerakyatan di UGM
  - ◆ Keprihatinan terhadap perkembangan ilmu dan sistem ekonomi Indonesia yang akhir-akhir ini semakin jauh dari cita-cita proklamasi serta belum mengutamakan rakyat dalam proses penyelenggaraan ekonomi.
  - ◆ Berdirinya Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM menggantikan Pusat Studi Ekonomi Pancasila (gagasan Prof Mubyarto).
  - ◆ Perubahan nama menjadi Ekonomi Kerakyatan untuk lebih menyesuaikan dengan perundangan di Indonesia (Pasal 33 UU 1945), serta memperluas cakupan pemikiran ekonomi.

4

## PENGERTIAN

Pemahaman Ekonomi Kerakyatan

- ◆ Ekonomi kerakyatan (Demokrasi ekonomi) adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (rakyat) dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian (Baswir, 1993).
- ◆ Ekonomi kerakyatan adalah tatalaksana ekonomi yang bersifat kerakyatan yaitu penyelenggaraan ekonomi yang memberi dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, yaitu keseluruhan aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh rakyat kecil.

Sumber: <http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/>

## Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan (1)

- ◆ **Peranan vital negara (pemerintah):** negara dapat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi.
- ◆ **Efisiensi ekonomi berdasar atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan:** Efisiensi dalam sistem ekonomi kerakyatan dipahami secara komprehensif dalam arti memperhatikan baik aspek kualitatif dan kuantitatif, keuangan dan non-keuangan, maupun aspek kelestarian lingkungan.
- ◆ **Mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerjasama (kooperasi):** Mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan, kecuali untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetap di dasarkan atas mekanisme pasar. Tetapi mekanisme pasar bukan satu-satunya. Selain melalui mekanisme pasar, alokasi juga didorong untuk diselenggarakan melalui mekanisme usaha bersama (koperasi).

Sumber: <http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/>

## Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan (2)

- ◆ **Pemerataan penguasaan faktor produksi:** Penyelenggaraan pasar dan koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan harus dilakukan dengan terus menerus melakukan penataan kelembagaan, yaitu dengan cara pemerataan penguasaan modal atau faktor-faktor produksi kepada segenap lapisan anggota masyarakat.
- ◆ **Koperasi sebagai sokoguru perekonomian**
- ◆ **Pola hubungan produksi kemitraan, bukan buruh-majikan:** Karakter utama ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi pada dasarnya terletak pada dihilangkannya watak individualistis dan kapitalistis dari wajah perekonomian Indonesia.
- ◆ **Kepemilikan saham oleh pekerja:** Perusahaan hendaknya dikembangkan sebagai bangun usaha yang dimiliki dan dikelola secara kolektif (kooperatif) melalui penerapan pola-pola Kepemilikan Saham oleh Pekerja.

Sumber: <http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/>

## ◆ Perekonomian Lokal

- ◆ Aktifitas ekonomi yang lebih banyak melibatkan kontribusi masyarakat setempat dan menjunjung tinggi kearifan lokal merupakan wujud dari ekonomi kerakyatan
- ◆ Otonomi daerah yang telah dilaksanakan oleh Indonesia semenjak awal tahun 2000 sangat mendukung berkembangnya aktifitas ekonomi lokal.

8

## Peran Fiskal Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan

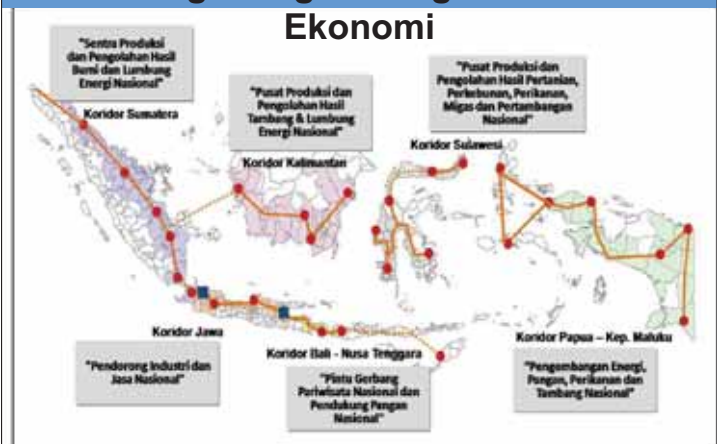
- Peran utama Pemerintah dalam ekonomi kerakyatan adalah menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah membentuk BUMN dan BUMD untuk melaksanakan peran tersebut, seperti PLN, Pertamina, dan Perusahaan Daerah Air Minum.
- Pemerintah pusat dan daerah juga berperan dengan terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari belanja pada APBN dan APBD. Disamping itu, banyak BUMN dan BUMD diciptakan sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian.
- Beberapa kebijakan yang mendukung perekonomian kerakyatan antara lain sebagai berikut:
  - Pembinaan koperasi dan UKM yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM
  - Dana PNPM Mandiri yang memberdayakan masyarakat desa
  - Program Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

## MP3EI

- Pemerintah telah menyiapkan MP3EI untuk mendorong percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi melalui pembangunan di enam koridor ekonomi. Upaya tersebut diharapkan memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja.
- Dalam rangka memaksimalkan manfaat MP3EI dan untuk mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, Pemerintah sedang menyiapkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).
- MP3KI merupakan affirmative action sehingga pembangunan ekonomi yang terwujud tidak hanya pro-growth, tetapi juga pro-poor, pro-job dan pro-environment, termasuk penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin.

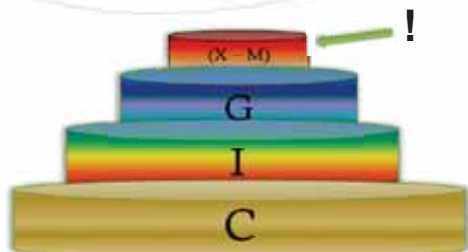
11

## Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi



12

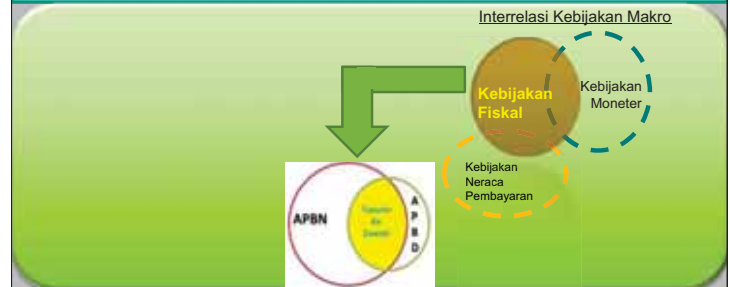
## Peran Pemerintah Pusat dan Daerah: Antara Pertumbuhan dan Pemerataan



- $Y = C + I + G + (X - M)$
- Kondisi Ideal : Kuc makin besar dan dapat dinikmati secara merata
- Bagaimana faktor terkini?

13

## Kebijakan Makro Ekonomi: Pertumbuhan VS Pemerataan



- Kebijakan Fiskal menjadi titik penentu?
- Padahal kondisi Fiskal dipengaruhi oleh perkembangan dinamis ekonomi domestik dan global.
- Kemampuan mendukung pembiayaan menjadi terbatas.
- Prioritas alokasi menjadi penentu.

14

## Kebijakan Fiskal dan Tantangannya



1. Kemana arah alokasi : Pertumbuhan VS Pemerataan.
2. Kendala dan Tantangan: antara idealisme dan fakta dilapangan.
  - a. Budget Pemerintah Pusat.
  - b. Budget Pemerintah Daerah.

15

## Budget Pemerintah Pusat dan Daerah: Dimana Sekarang dan Harus Kemana?

Daerah

Pusat



- o Belanja modal sekitar 20 %
- o Belanja aparatur sangat dominan sekitar 45%
- o Penting untuk meningkatkan belanja modal
- o Belanja K/L subsidi energi dan kewajiban utang terbagi bayar rata
- o Belanja transfer ke daerah sekitar 32%, dan yang mengalir ke daerah lebih dari 62%
- o Mengelola subsidi daerah menjadi kunci keberhasilan Fiskal

16

## Tantangan Ekonomi Kerakyatan ke Depan: Prespektif Fiskal

Fiskal Pusat :

- Meningkatkan program-program yang berpihak kepada rakyat (rakyat kecil).
- Mengelola subsidi (energi) secara bijak untuk mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (menurunkan subsidi harga dan mengalihkan pada subsidi khusus rakyat kecil).
- Perlu support seluruh komponen bangsa.

Fiskal Daerah:

- Meningkatkan belanja modal.
- Mengelola secara bijak belanja aparatur, diturunkan secara gradual.
- Perlu support stakeholder untuk mendorong belanja modal.

17

## EMPAT KLASTER PROGRAM PRO-RAKYAT

KEBIJAKAN EKONOMI-MAKRO

**Klaster-1**

1. BANTUAN SISWA MISKIN
2. JAMKESMAS
3. RASKIN
4. PKH
5. BLT (bila diperlukan saat krisis)
6. Dll.

**Klaster-2**

- PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)

**Klaster-3**

- KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

**Klaster-4**

1. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH
2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH
3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT
4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT
5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan \*)
6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan \*)

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, serta Perluasan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Pengurangan Angka Kemiskinan

\*) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin.

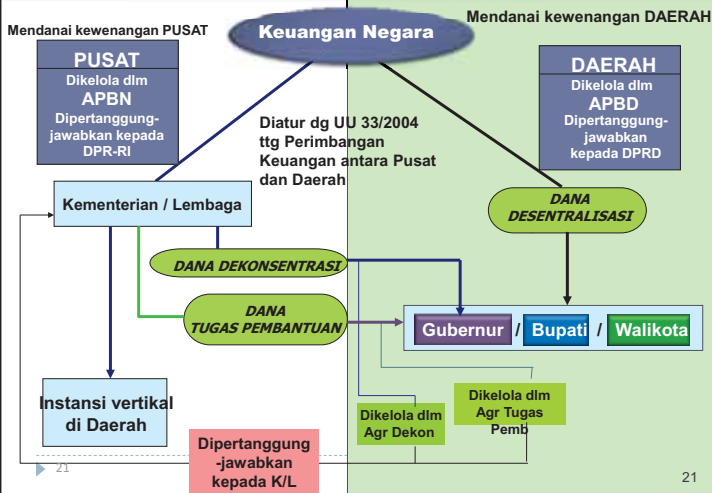
18

# TERIMA KASIH



## Lampiran : Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

### IMPLEMENTASI HKPD DI INDONESIA



### IMPLEMENTASI PEMBAGIAN SUMBER PENDANAAN

*MONEY FOLLOWS FUNCTION*

